

SALINAN



BUPATI PATI

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 66 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI KABUPATEN PATI

TAHUN 2017-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dengan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu dan bergizi seimbang, perlu adanya koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan secara terpadu;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyusun rencana aksi Pangan dan Gizi setiap 5 (lima) tahun sekali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Pati Tahun 2017-2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

10. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 114);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PANGAN GIZI KABUPATEN PATI TAHUN 2017-2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 yang selanjutnya disebut RAD-PG Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 adalah Rencana Aksi Daerah Pencapaian Target Pembangunan Pangan dan Gizi Tahun 2017-2022.

## BAB II

### RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI

#### Pasal 2

RAD-PG Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dan arahan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan pencapaian status gizi bagi masyarakat di Kabupaten Pati dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah pada Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022 dalam bentuk arah kebijakan, strategi dan program serta kegiatan.

#### Pasal 3

- (1) Sistematika RAD-PG Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II KONDISI UMUM, TANTANGAN DAN HAMBATAN

BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

BAB IV RENCANA AKSI PANGAN DAN GIZI

BAB V KERANGKA PELAKSANAAN DAN MONITORING-EVALUASI

BAB VI PENUTUP

- (2) Dokumen RAD-PG Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 dengan sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati  
pada tanggal 23 Maret 2018

BUPATI PATI,

Ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati  
pada tanggal 23 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

Ttd.

SUHARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2018 NOMOR 66

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH, MM

Pembina

NIP. 19720424 199703 2 010

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PATI  
NOMOR 66 TAHUN 2018  
TENTANG  
RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI  
KABUPATEN PATI TAHUN 2017-2022

## **BAB I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Fokus pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen perencanaan pemerintah baik pusat maupun daerah Provinsi Jawa Tengah di bidang pangan dan gizi adalah pembangunan Sumber Daya Manusia. Mengingat bahwa Sumber Daya Manusia yang memadai dengan ditopang oleh ketersediaan (termasuk menyangkut kualitas dan keamanan) dan aksesibilitas terhadap pangan dan gizi yang baik akan berdampak pada kualitas hidup masyarakat baik secara fisik maupun mentalnya.

Pemerintah Kabupaten Pati dengan segala sumber daya pendukung yang ada beserta kearifan lokalnya, akan terus bersinergi dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi dalam upaya mewujudkan pembangunan SDM yang berkualitas.

Secara umum, kondisi capaian pangan dan gizi di Kabupaten Pati cukup bagus khususnya terkait beberapa indikator kesehatan seperti kasus balita gizi buruk dan *stunting*, dibandingkan pada level provinsi maupun nasional. Ketersediaan dan aksesibilitas terhadap pangan beragam juga relatif cukup bagus. Namun diakui, bahwa dalam kondisi tersebut, apabila dibedah secara lebih mendalam khususnya secara spasial (kewilayahan), maka masih cukup banyak permasalahan maupun kendala yang harus segera dituntaskan seperti kasus gizi buruk dan *stunting* pada wilayah-wilayah kecamatan tertentu, masih adanya beberapa kasus kematian ibu melahirkan, kasus kematian bayi. Kemudian pada bidang pangan yang terkait dengan kemampuan mengakses pangan oleh rumah tangga miskin, bencana alam berupa banjir dan tanah longsor, semakin menyempitnya lahan pertanian berkelanjutan, faktor lingkungan sebagai imbas dari pemanasan global dan lain-lain.

Pada hakekatnya pembangunan pangan dan gizi pada periode sekarang hingga 5 (lima) tahun ke depan memiliki perbedaan yang mendasar jika dibandingkan dengan kebijakan/intervensi periode lima tahun sebelumnya. Periode sebelumnya penanganan masalah pangan dan

gizi lebih ditekankan pada aspek kesehatan dan pangan yang melibatkan stakeholder yang terbatas (yang langsung menangani). Saat ini dan rencana yang akan datang, penanganan ditujukan pada aspek kesehatan dan non kesehatan dengan melibatkan segenap stakeholder yang bersifat multisektor baik yang memiliki peran secara langsung maupun yang bersifat mendukung. Konsep kebijakan ini ditempuh mengacu pada komitmen internasional yang tertuang dalam Dokumen SDG's (*sustainable development goals*) yang berlaku pada Tahun 2015 hingga 2030, dimana fokus penekanan pada aspek pembangunan secara berkelanjutan dengan pelibatan yang bersifat multisektor.

Dokumen perencanaan pembangunan pangan dan gizi menjadi sangat penting sebagai landasan bagi pemerintah daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dokumen ini sebagai tindak lanjut dari dokumen di atasnya seperti RPJPD dan RPJMD yang bersifat sektoral melalui pendekatan spasial. Terlepas keterkaitannya dengan kebijakan yang lebih makro tersebut, penyusunan dokumen perencanaan pembangunan bidang pangan dan gizi telah diatur dalam undang-undang.

Sebagaimana Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, khususnya pasal 63 ayat 3 yang mengamanatkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menyusun rencana aksi pangan dan gizi setiap 5 (lima) tahun. Sehingga sebagai komitmen daerah terhadap kebijakan pemerintah pusat di bidang pangan dan gizi, maka disusunlah dokumen RAD-PG Kabupaten Pati Tahun 2017 – 2022 yang akan dijadikan rujukan bagi pembangunan pangan dan gizi daerah yang diimplementasikan secara tahunan selama masa periode perencanaan.

## **B. Tujuan**

1. Melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, sebagaimana pasal 63 ayat 3 yang berbunyi bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Pangan dan Gizi setiap 5 (lima) tahun;
2. Menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah tahunan khususnya terkait perencanaan pembangunan bidang pangan dan kesehatan (gizi) serta pedoman bagi lembaga non pemerintah atau swasta dan masyarakat

sehingga terwujud kesepahaman dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran program pembangunan;

### **C. Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, khususnya Pasal 63 (ayat 3) yang menyebutkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyusun rencana aksi Pangan dan Gizi setiap 5 (lima) tahun;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
5. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
7. KSRAN-PG Tahun 2015 – 2019;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pati Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pati Tahun 2017-2022;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98).

## **BAB II. KONDISI UMUM TANTANGAN DAN HAMBATAN**

### **A. Kondisi Umum Pangan dan Gizi Kabupaten Pati**

#### **1. Pangan**

##### **a. Pengembangan Ketersediaan Pangan**

Kabupaten Pati memiliki faktor “endowment” berupa sumber daya alam yang cukup melimpah. Anugerah alam tersebut berupa sumber daya sektor pertanian dan sektor kelautan dan perikanan,

sebagaimana telah tertuang dalam dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dimana sektor pertanian dan perikanan kelautan menjadi tumpuan dalam pembangunan daerah dengan jargon atau visi jangka panjangnya Pati Bumi Mina Tani.

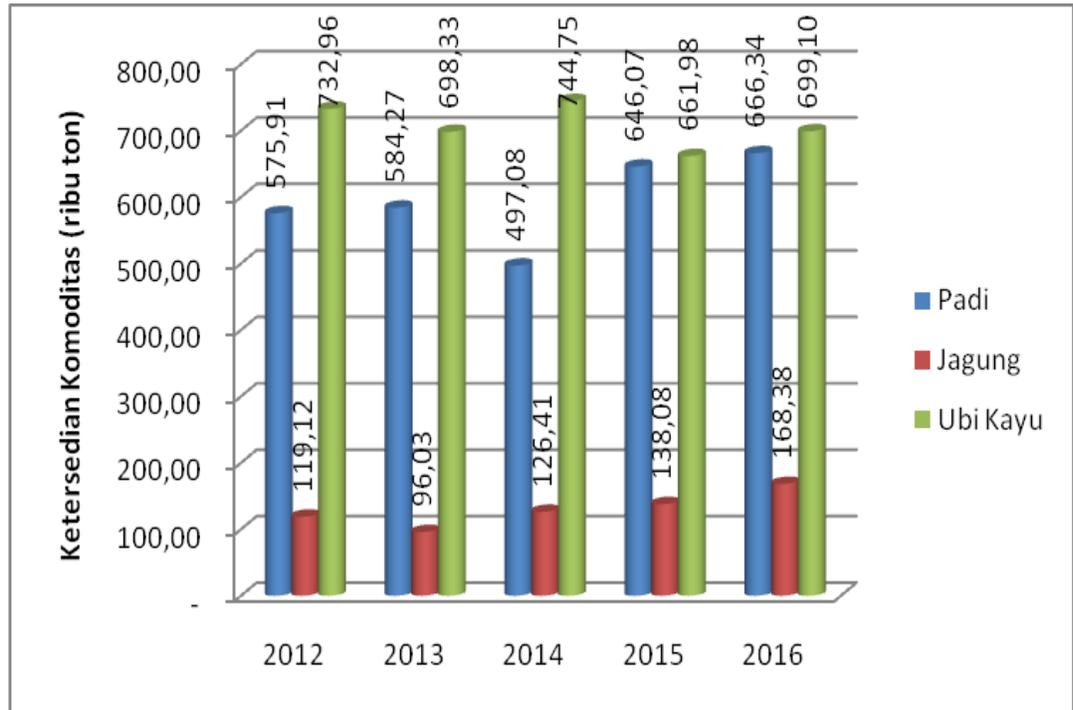
Sektor pertanian dan perikanan merupakan sumber pangan utama sehingga diperlukan pengelolaan yang optimal serta berkelanjutan guna mendukung ketersediaan pangan bagi masyarakat. Hal ini sangat penting, mengingat ketersediaan pangan merupakan salah satu komponen pembentuk kondisi ketahanan pangan pada suatu daerah. Beberapa produk sektor pertanian yang ada di Kabupaten Pati (beberapa diantaranya menjadi komoditas yang memiliki keunikan lokal), antara lain pada sub sektor :

- tanaman pangan meliputi padi, jagung, kedelai, ketela, kacang hijau serta berbagai komoditas makanan lainnya;
- hortikultura meliputi bawang merah, cabebesar, kangkung, bayam, pisang, rambutan, jeruk pamelon, durian dan berbagai macam jenis buah dan sayuran lainnya;
- perkebunan meliputi tebu, kelapa, kelapa kopyor, kopi, kakao;
- peternakan meliputi daging sapi, kambing, ayam, itik, telur, susu;
- perikanan yang menghasilkan berbagai jenis ikan yang berasal dari perikanan tangkap dan perikanan budidaya serta tambak garam.

### **1) Produksi Tanaman Pangan**

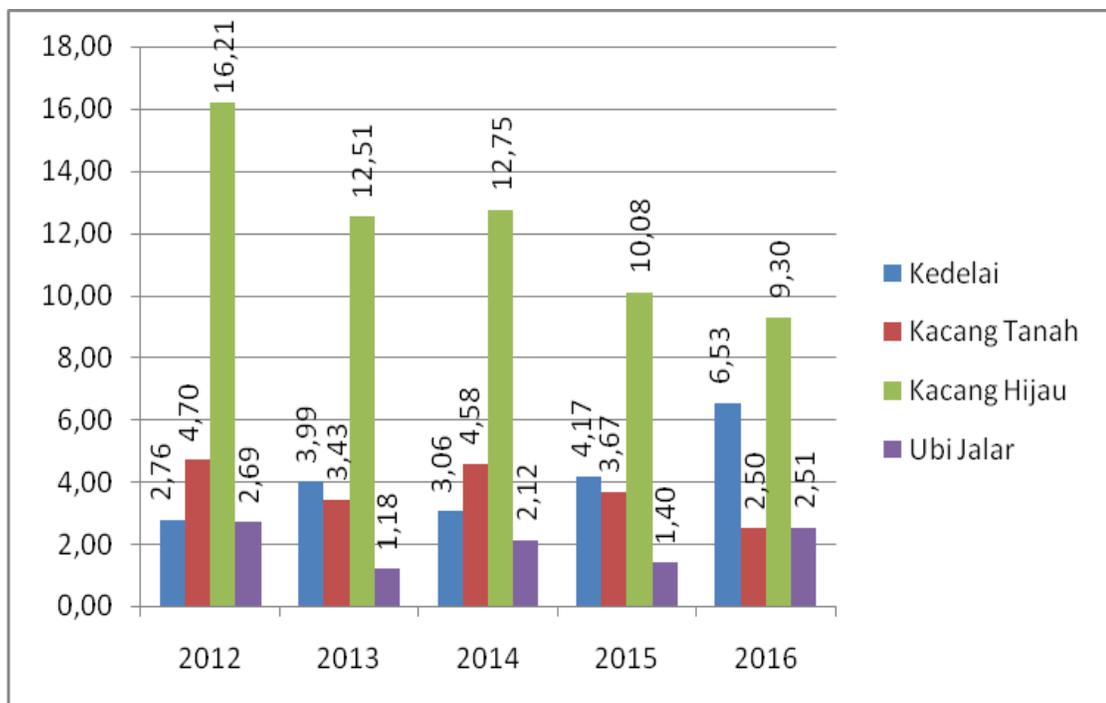
Seiring dengan peningkatan produksi bahan pangan, pertumbuhan ketersediaan komoditas pangan nabati selama Tahun 2012 - 2016 mengalami peningkatan seperti pada Grafik 2.1 dan Grafik 2.2. Produksi padi di Kabupaten Pati pada Tahun 2016 mencapai 666.344 ton Gabah Kering Giling/GKG, naik 3,14% dibandingkan tahun 2015 sebesar 646.048 ton; produksi jagung sebesar 168.376 ton meningkat 21,94% dari Tahun 2015 sebesar 138.075 ton; produksi kedelai sebesar 6.529 ton meningkat 56,49% dari tahun 2015 sebesar 4.172 ton. Peningkatan produksi komoditas padi, jagung maupun kedelai disebabkan karena adanya peningkatan luas panen maupun produktivitas komoditas tersebut.

**Grafik 2.1.**  
**Ketersediaan Padi, Jagung, Ubi Kayu di Kabupaten Pati Tahun 2012-2016**



Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Pati 2017

**Grafik 2.2.**  
**Ketersediaan Kedelai, Kacang Tanah, Kacang Hijau dan Ubi Jalar Di Kabupaten Pati Tahun 2012-2016**



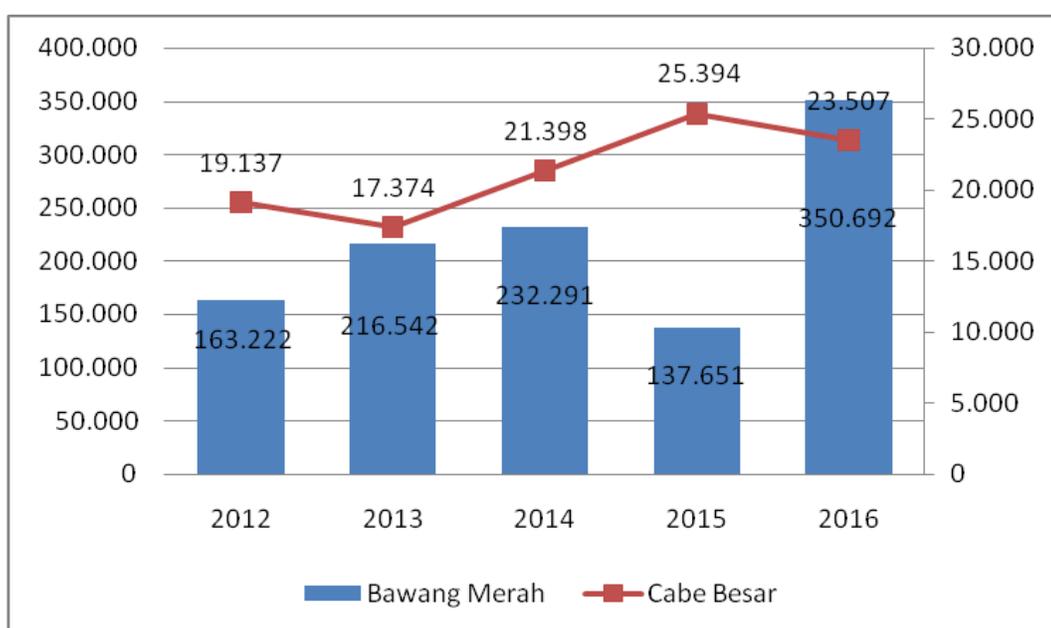
Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Pati 2017

## 2) Produksi Hortikultura

Kabupaten Pati sangat potensial untuk pengembangan tanaman hortikultura, kondisi ini didukung dengan agroklimat dan agroekosistem yang sesuai. Produksi tanaman hortikultura jenis sayuran di Kabupaten Pati khususnya yang memiliki volume

hasil yang paling besar yaitu bawang merah dan cabe besar. Data menunjukkan bahwa produksi bawang merah pada tahun 2016 sebanyak 350.692 kuintal, meningkat dari Tahun 2015 sebanyak 137.651 kuintal, sedangkan untuk produksi cabe besar sebanyak 23.507 kuintal, turun 7,4% dibanding Tahun 2015 yang mencapai produksi sebesar 25.394 kuintal. Perkembangan produksi tanaman hortikultura bawang merah dan cabe besar di Kabupaten Pati Tahun 2012- 2016 sebagaimana pada Grafik 2.3.

**Grafik 2.3.**  
**Ketersediaan Bawang Merah dan Cabe Besar Di Kabupaten Pati Tahun 2012-2016**



Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Pati 2017

Selain bawang merah dan cabai besar, ada beberapa jenis sayuran lain yang merupakan produk atau komoditas dari hortikultura sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 2.1.**  
**Produksi Sayur-sayuran Kabupaten Pati Tahun 2013-2016**

No.	Jenis Tanaman	Produksi (Kw)			
		2013	2014	2015	2016
1	Bawang merah	216.542	232.291	137.651	350.692
2	Sawi	9.467	8.594	6.909	9.329
3	Kacang merah	0	570	0	0
4	Kacang panjang	10.855	12.227	16.466	9.038
5	Cabe besar	17.374	21.398	2.540	23.507
6	Cabe rawit	256	384	21.710	2.506
7	Tomat	3.115	4.758	5.968	4.476
8	Terung	5.759	4.115	0	1.433

No.	Jenis Tanaman	Produksi (Kw)			
		2013	2014	2015	2016
9	Ketimun	5.410	7.630	5.917	3.521
10	Kangkung	13.153	12.051	10.784	10.582
11	Bayam	5.866	5.232	8.170	9.482
	<b>Jumlah</b>	<b>287.797</b>	<b>309.250</b>	<b>238.969</b>	<b>424.566</b>

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Pati, 2014-2017

Mengacu pada tabel 2.1 di atas, produksi sayur-sayuran di Kabupaten Pati cenderung fluktuatif, sehingga hal ini perlu ada pembenahan dalam sistem produksinya, dimulai dari hulu (budidaya) hingga pada aspek pengelolaan pasca panennya termasuk dalam hal akurasi data produksi, dengan harapan ketersediaan pangan dan gizi yang berasal dari nabati dapat lebih terjamin, meskipun secara umum kebutuhan akan sayur mayur masyarakat selama ini tidak sampai mengalami kelangkaan stok sayur-sayuran.

Disamping sayuran, produksi buah-buahan juga cukup melimpah dan sangat beragam. Hal ini juga dikarenakan agroklimat di wilayah Kabupaten Pati sangat cocok dengan beragam jenis tanaman buah-buahan. Berikut produksi buah-buahan di Kabupaten Pati sebagaimana Tabel 2.2.

**Tabel 2.2.**  
**Produksi Buah-Buahan kabupaten Pati**  
**Tahun 2011-2016**

No.	Jenis Tanaman	Produksi				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Jeruk siam (ton)	2.749	7.842	11.450	12.088	13.535
2	Alpukat (ton)	2.999	4.666	8.210	10.303	11.184
3	Duku (ton)	827	4.580	1.011	2.659	3.690
4	Jambu biji (ton)	11.243	7.715	2.624	4.225	4.762
5	Sirsak (ton)	486	1.132	1.171	1.314	192
6	Rambutan (ton)	58.290	50.759	24.926	38.531	38.788
7	Pepaya (ton)	12.208	14.829	15.281	20.286	19.147
8	Melinjau (ton)	9.291	13.925	14.304	10.248	10.640
9	Belimbing (ton)	2.499	6.649	1.351	902	1.282
10	Jeruk pamelelo (ton)	12.582	12.593	28.421	42.011	23.350
11	Nangka (ton)	21.792	29.002	28.601	27.209	116.665
12	Sukun (ton)	4.249	6.127	15.399	16.937	15.638
13	Mangga (ton)	126.702	180.156	156.002	205.633	231.253
14	Durian (ton)	18.992	19.990	5.387	4.147	17.932
15	Sawo (ton)	10.978	5.812	10.403	8.397	9.756
16	Pisang (ton)	267.198	373.163	211.217	247.271	161.811
17	Jambu air (ton)	9.248	11.630	7.099	7.594	7.598

No.	Jenis Tanaman	Produksi				
		2012	2013	2014	2015	2016
18	Manggis (ton)	1.475	1.822	4.842	6.327	607.000
19	Salak (ton)	95	136	186	276	357
20	Petai (ton)	23.716	33.905	38.377	84.556	88.108
21	Semangka (ton)	129.188	29.780	27.627	61.787	28.572
22	Melon (ton)	10.345	8.499	11.016	9.102	6.863
23	Blewah (ton)	14.906	29.780	-	15.980	-
24	Nanas (ton)	66	16	33	-	-
<b>Jumlah (ton)</b>		<b>752.124</b>	<b>854.508</b>	<b>624.938</b>	<b>837.783</b>	<b>1.418.123</b>

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Pati, Tahun 2017

Dilihat dari tren produksi buah-buahan secara keseluruhan, ada kecenderungan terus meningkat khususnya sejak tahun 2015. Meningkatnya produksi ini diharapkan mampu membawa manfaat positif bagi kecukupan pangan dan gizi masyarakat khususnya kecukupan vitamin yang berasal dari buah-buahan yang disuplai dari wilayah setempat Kabupaten Pati. Dengan melimpahnya produksi buah-buahan lokal ini, ke depan perlu dikembangkan upaya pengolahan pasca panen sebagai upaya untuk menjaga stabilitas ketersediaan buah-buahan melalui produksi makanan olahan berbasis buah-buahan, dengan tidak mengurangi kandungan manfaat gizi dari produk olahan lanjutan tersebut.

### 3) Produksi Perkebunan

Produksi tanaman perkebunan sebagai sumber bahan pangan yang ada di Kabupaten Pati relatif cukup melimpah seperti tebu, kelapa dan kelapa kopyor, dan kopi. Tanaman kakao juga dibudidayakan oleh sebagian masyarakat khususnya di wilayah lereng Gunung Muria, namun produksinya relatif kecil. Selain itu juga terdapat produksi mete dan cengkeh yang jumlahnya juga relatif kecil dibandingkan dengan hasil produksi sejenis dari kabupaten lain.

**Tabel 2.3.**  
**Produksi Tanaman Perkebunan Kabupaten Pati**  
**Tahun 2013-2016**

No	Jenis Tanaman	Produksi			
		2013	2014	2015	2016
1	Kelapa (butir)	6.100.209	6.102.649	6.088.625	5.858.734
2	Kelapa kopyor (butir)	883.350	883.965	972.362	883.967
3	Kopi (kw)	1.113.427	1.227.347	1.350.083	1.187.335
4	Cengkeh (kw)	266.265	303.441	350.758	303.415
5	Tebu (kw)	59.345	46.198	66.511	59.860
6	Mete (kw)	9.319	9.630	11.556	239.000
7	Kakao (kw)	10.780	11.935	12.245	41.370

*Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Pati, Tahun 2017*

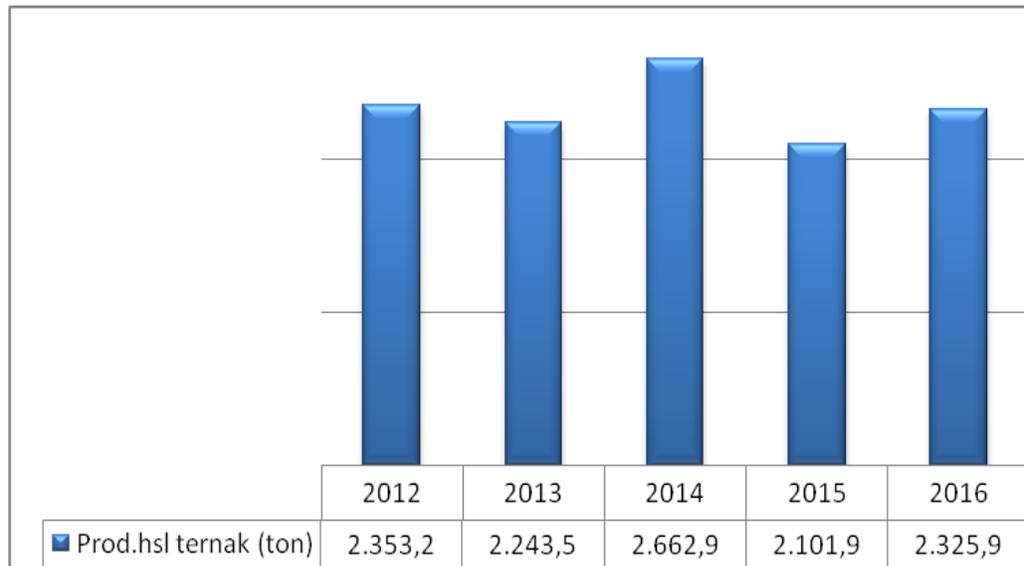
Produksi tanaman perkebunan khususnya tebu sebagai penopang industri gula di Jawa Tengah pada Tahun 2016 mengalami penurunan. Hal ini perlu mendapatkan perhatian yang khusus dari Pemerintah untuk berupaya mendorong peningkatan produksi melalui skema produksi yang lebih berpihak pada petani tebu. Kebijakan stabilisasi harga gula melalui impor sering menjadi kontradiktif dengan upaya penciptaan swasembada gula di dalam negeri yang produksinya selalu mengalami defisit.

#### **4) Produksi Peternakan**

Produksi daging di Kabupaten Pati diperoleh dari rumah-rumah pemotongan hewan milik masyarakat atau swasta. Produksi daging cenderung terus menurun terutama sejak tahun 2015 dibandingkan tahun sebelumnya dan kondisi di tahun 2016 kembali sedikit meningkat tapi masih di bawah total produksi tahun 2014.

Ditinjau dari prevalensi penyakit ternak yang cenderung nihil, maka disinyalir penurunan produksi daging di Kabupaten Pati bukan disebabkan oleh adanya endemik penyakit yang berpengaruh terhadap produktivitas ternak, namun lebih karena faktor kurang optimalnya pembudidayaan hewan ternak oleh para peternak. Berikut adalah data produksi ternak di Kabupaten Pati Tahun 2012-2016.

**Grafik 2.4.**  
**Produksi Daging di Kabupaten Pati Tahun 2012-2016**



*Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Pati, Tahun 2017*

Mengacu pada grafik 2.4, penurunan produksi ternak sebagai salah satu sumber protein hewani harus disikapi dengan adanya pola pengelolaan dan pengembangan budidaya ternak oleh pemerintah sebagai fasilitator dan regulator serta peternak sebagai pelaku usaha. Mengingat sumber pakan ternak di Kabupaten Pati relatif cukup melimpah, maka Pemerintah Kabupaten Pati perlu mendorong pihak masyarakat ataupun swasta untuk berinvestasi di bidang peternakan yang sesungguhnya sangat potensial untuk dikembangkan dan memiliki prospek usaha yang sangat bagus ke depannya. Hal ini apabila berjalan akan sangat membantu pemerintah dalam mewujudkan ketersediaan protein hewani guna memenuhi kecukupan gizi masyarakat.

### **5) Produksi Perikanan**

Perikanan merupakan salah satu sub sektor yang memberikan kontribusi yang sangat penting bagi masyarakat Kabupaten Pati. Tidak hanya sebagai andalan mata pencaharian masyarakat, keberadaanya membawa manfaat baik secara ekonomi maupun dalam hal pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi.

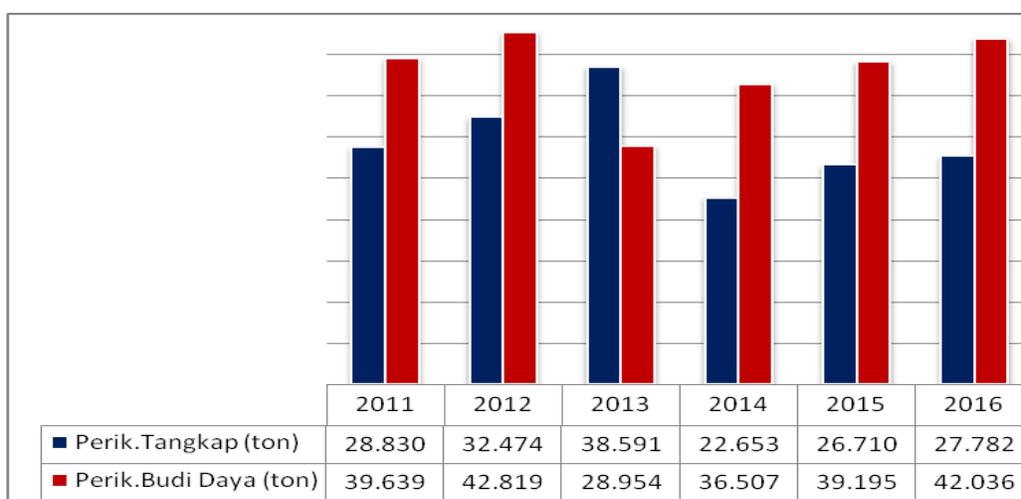
Memiliki panjang pantai  $\pm 60$  km, membuat potensi produksi perikanan seakan tidak terbatas. Ini merupakan salah satu aset masyarakat Kabupaten Pati dalam menunjang

pemenuhan protein hewani yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat secara luas.

Beberapa sumber produksi ikan di Kabupaten Pati adalah dari penangkapan di laut, perairan umum (darat) dan perikanan budidaya berupa tambak. Di samping itu, hasil sampingan sumber daya kelautan adalah berupa produksi garam rakyat yang banyak dijumpai di wilayah utara hingga timur Kabupaten Pati.

**Grafik 2.5.**

**Produksi Ikan di Kabupaten Pati Tahun 2011-2016**



Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati, Tahun 2017

Secara keseluruhan produksi ikan di Kabupaten Pati terus mengalami peningkatan. Hal ini akan semakin memperkuat stok daerah terhadap kebutuhan protein hewani berbasis mina sehingga sangat ironi apabila di wilayah Kabupaten Pati masih terdapat warga masyarakat yang kekurangan gizi khususnya karena kekurangan protein. Penting juga ke depan untuk semakin ditingkatkannya produksi makanan berbasis ikan yang semakin variatif dan menarik sehingga dapat mendorong peningkatan konsumsi ikan oleh masyarakat secara lebih luas.

#### **b. Pengembangan Sistem Distribusi dan Akses Pangan**

Kondisi sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Pati yang cenderung mengalami perbaikan (secara kualitas) yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang progresif, peningkatan pendapatan perkapita masyarakat, peningkatan distribusi pendapatan, penurunan angka pengangguran dan penurunan tingkat kemiskinan. Di samping itu indikator di bidang sosial khususnya

kesehatan, menunjukkan sudah tidak lagi diketemukan kasus balita gizi buruk dan balita gizi kurang.

Dengan capaian pembangunan daerah seperti tersebut di atas, bukan menjadi jaminan masalah kerawanan pangan pada wilayah tersebut tidak akan terjadi. Kerawanan pangan wilayah adalah kondisi di mana pada wilayah tersebut sebagian rumah tangga penduduknya tidak dapat memenuhi 70% kecukupan energi dan protein untuk pertumbuhan normal secara fisik. Hal ini berarti masih terbuka kemungkinan (potensi) terjadinya kasus rumah tangga rawan pangan dengan kondisi sosial ekonomi sebagaimana digambarkan di atas.

Secara umum di Jawa Tengah, kasus kerawanan pangan muncul di antaranya dialami oleh rumah tangga miskin yang tidak memiliki akses terhadap sumber daya kelistrikan.

Sebagai langkah awal guna mengawali upaya preventif dalam penanganan daerah rawan pangan, maka pemerintah daerah harus melakukan pemetaan terhadap wilayah-wilayah yang ditengarai berpotensi terjadi kasus rumah tangga yang kesulitan dalam mengakses kebutuhan pangan dan gizi sebagaimana mestinya.

Kabupaten Pati melalui Dinas Ketahanan Pangan selama ini telah menyusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA), namun basis penyusunannya belum menyentuh level unit masyarakat yang lebih kecil yaitu desa, sehingga informasi yang dihasilkan dari pemetaan yang telah dilakukan belum bisa mendeteksi kelompok masyarakat di wilayah mana yang perlu mendapat prioritas penanganan terhadap kemungkinan munculnya masalah kerawanan pangan.

Ke depan perlu dilakukan pemetaan terhadap wilayah-wilayah rawan pangan, khususnya wilayah dengan prosentase penduduk miskinnya relatif besar dengan basis pemetaan di tingkat desa bahkan hingga pada level rukun warga atau rukun tetangga.

Adapun untuk melakukan pemetaan sebagaimana telah disebutkan, diperlukan 13 indikator yang dapat mengukur aspek-aspek ketahanan pangan dan gizi yang meliputi :

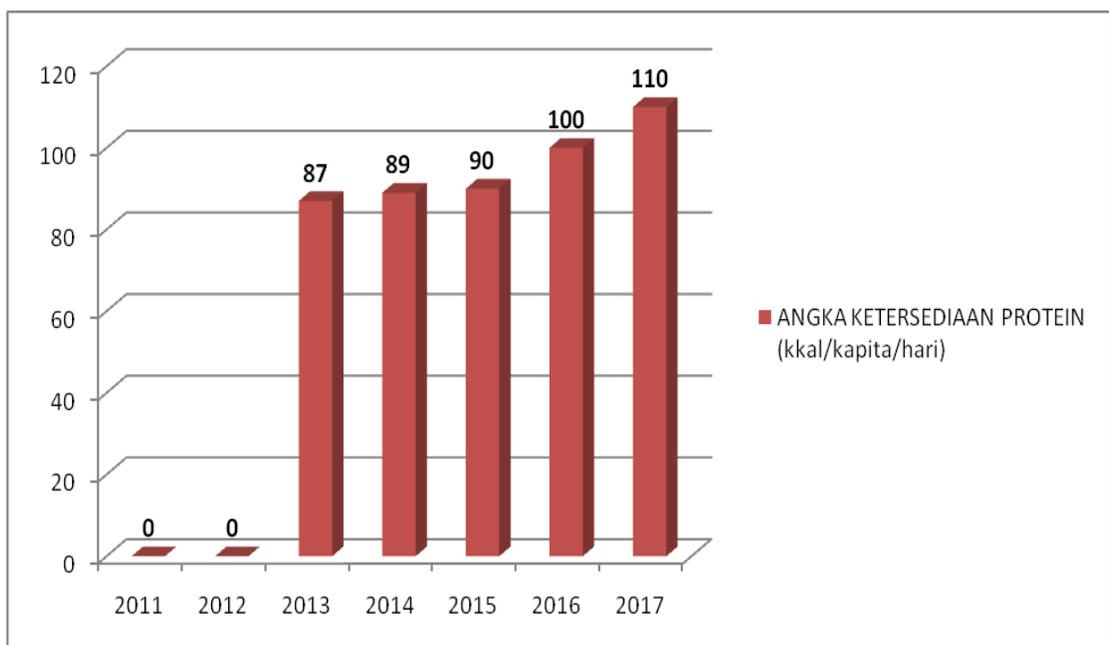
- rasio konsumsi normatif terhadap produksi bersih perkapita;
- prosentase penduduk miskin;
- rumah tanpa akses listrik;

- desa tanpa akses jalan;
- perempuan buta huruf;
- angka harapan hidup;
- berat badan balita;
- akses rumah tangga dengan fasilitas kesehatan;
- akses rumah tangga terhadap air bersih;
- deforestasi hutan;
- persentase wilayah yang mengalami gagal panen (puso);
- frekwensi terjadinya bencana alam;
- fluktuasi curah hujan.

**c. Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan**

Aspek ketersediaan pangan guna mendukung pola konsumsi pangan bergizi menjadi penentu dalam mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera. Salah satu kebutuhan pangan yang sangat diperlukan oleh manusia untuk pertumbuhan dan peremajaan sel tubuh yang rusak adalah terkait ketersediaan protein. Berikut adalah kondisi ketersediaan protein di Kabupaten Pati seperti pada Grafik 2.6.

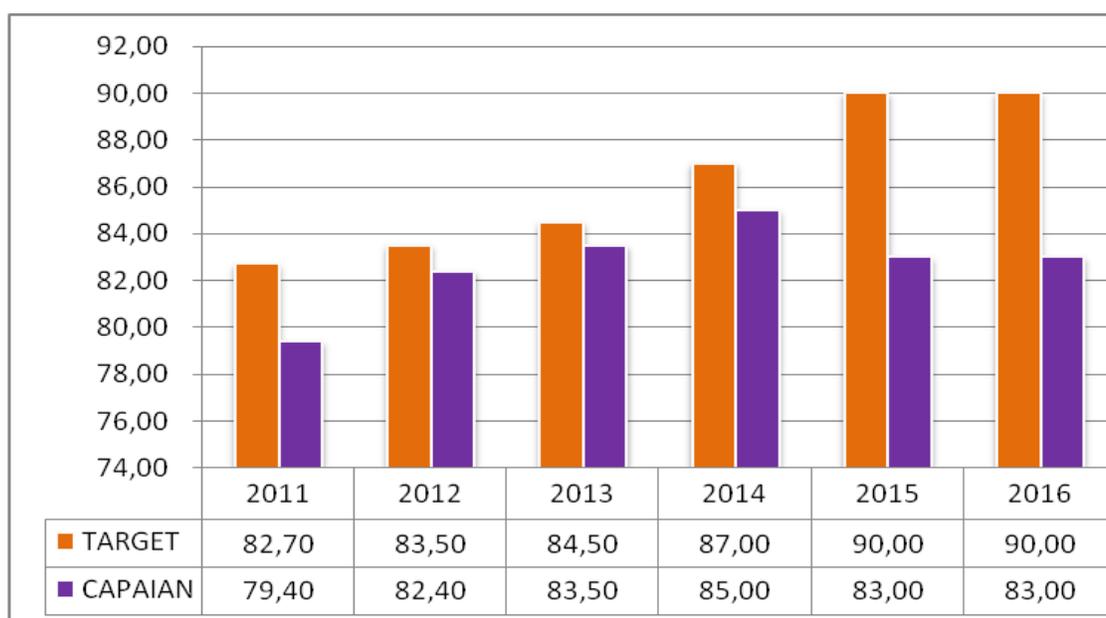
**Grafik 2.6.**  
**Tingkat Ketersediaan Protein di Kabupaten Pati**  
**Tahun 2011-2016**



Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pati, Tahun 2017

Guna memenuhi kebutuhan gizi yang seimbang, diperlukan pemahaman dan tindakan untuk mewujudkan gizi seimbang oleh masyarakat melalui penganekaragaman konsumsi pangan yang aman dan bergizi sehingga dapat terwujud manusia yang sehat, aktif dan produktif. Sedangkan alat ukur keanekaragaman konsumsi masyarakat menggunakan indeks komposit yang disebut skor PPH (pola pangan harapan). Adapun pola konsumsi pangan dimaksud meliputi pemenuhan konsumsi akan padi-padian, umbi-umbian, protein hewani, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah, dan lain-lain. Berikut data skor PPH Kabupaten Pati sebagaimana Grafik 2.6.

**Grafik 2.7**  
**Perkembangan Skor PPH Kabupaten Pati**  
**Tahun 2012-2016**



*Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pati, Tahun 2017*

Dari Grafik 2.7 terlihat bahwa capaian skor PPH dalam 2(dua) tahun masih dibawah target yang telah ditentukan. Masih diperlukan upaya yang lebih intensif guna memberikan dorongan dan pemahaman serta kemudahan akses pangan beragam dan aman kepada masyarakat sehingga pemenuhan keragaman konsumsi pangan daerah bisa terlampaui.

Dilihat dari pola konsumsi pangan bergizi oleh masyarakat Kabupaten Pati, menunjukkan adanya peningkatan secara kualitas. Hal ini terlihat dari semakin meningkatnya konsumsi terhadap karbohidrat (padi-padian), protein (pangan hewani) dan vitamin

(sayur dan buah). Data konsumsi kelompok pangan sebagaimana Tabel 2.4.

**Tabel 2.4.**  
**Konsumsi Kelompok Pangan di Kabupaten Pati**  
**Tahun 2011-2016**

NO	INDIKATOR	TAHUN					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	BERAS (kg/kap/th)	850,3	911,1	815,9	849,0	860,0	866,8
2	UMBI-UMBIAN (kg/kap/th)	28,3	27,7	60,1	20,5	20,0	21,3
3	PANGAN HEWANI (kg/kap/th)	157,2	168,9	166,5	193,3	198,5	202,3
4	SAYUR DAN BUAH (kg/kap/th)	101,1	105,0	91,4	102,7	105,8	106,5

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pati, Tahun 2017

Peningkatan terhadap konsumsi pangan dengan gizi berimbang dapat mengindikasikan adanya perubahan pemahaman akan pentingnya gizi seimbang, namun aspek pemerataan pemahaman dan ditindaklanjuti dengan konsumsi riil masyarakat akan jauh lebih berarti.

**Tabel 2.5.**  
**Konsumsi Energi Masyarakat di Kabupaten Pati**  
**Tahun 2011-2016**

NO	KELOMPOK PANGAN	IDEAL	TAHUN					
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Padi-padian	1000	900	900	900	1000	1000	1000
2	Umbi-umbian	120	100	100	100	120	120	120
3	Pangan Hewani	240	210	210	210	240	240	240
4	Minyak dan lemak	200	200	200	200	200	200	210
5	Buah/biji bermyak	60	50	50	50	60	60	70
6	Kacang-kacangan	100	50	60	60	100	100	100
7	Gula	100	50	50	50	100	100	100
8	Sayur dan Buah	120	100	100	100	120	120	140
9	Lain-lain	60	30	30	40	70	60	60
<b>Jumlah</b>		<b>2000</b>	<b>1690</b>	<b>1700</b>	<b>1710</b>	<b>2010</b>	<b>2000</b>	<b>2050</b>

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pati, Tahun 2017

Tabel 2.5 menunjukkan bahwa ada tren peningkatan konsumsi energi oleh masyarakat. Terlihat bahwa konsumsi dari masing-masing komponen/kelompok pangan rata-rata telah mencapai taraf ideal. Namun yang perlu mendapat perhatian adalah bahwa angka yang tertera di atas harus mencerminkan konsumsi secara lebih merata oleh masyarakat.

#### **d. Penyuluh Pertanian**

Penyuluh pertanian memegang peranan yang sangat penting dalam menghantarkan berbagai program dan kegiatan pembangunan di bidang pertanian dalam arti luas (tanaman pangan & hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan) dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Berbagai kendala yang sering muncul dalam pembangunan di bidang pertanian adalah masih minimnya jumlah SDM penyuluh. Peran para penyuluh seharusnya tidak hanya memberikan pendampingan dan penyuluhan tentang bagaimana meningkatkan hasil produksi pada masyarakat, tapi juga pada aspek pemahaman dan peningkatan kesadaran terhadap pentingnya pangan dan gizi bagi kesehatan fisik masyarakat.

Di Kabupaten Pati hingga Tahun 2016, dari 21 kecamatan yang ada, baru 13 wilayah kecamatan yang memiliki tenaga petugas penyuluh lapangan (PPL) yang telah mengikuti pelatihan pangan gizi. Harapannya ke depan terdapat tenaga PPL berkualifikasi keahlian bidang pangan dan gizi di setiap kecamatan dan jumlahnya dapat terus ditingkatkan guna mencakup pelayanan kepada masyarakat secara lebih merata.

Sebagai gambaran terhadap capaian pembangunan pangan dan gizi pada Pilar Peningkatan Aksesibilitas Pangan Beragam pada tahun terakhir (Tahun 2015) pelaksanaan RAD-PG Kabupaten Pati Tahun 2011-2015, berikut Tabel 2.6.

**Tabel 2.6.**  
**Capaian Pilar Peningkatan Aksesibilitas Pangan Beragam**  
**Kabupaten Pati Tahun 2015**

No	Sasaran / Indikator	Tahun 2015		Status Capaian
		Target	Realisasi	
<b>Sasaran : meningkatnya tingkat keragaman konsumsi dan skor PPH</b>				
1.	Skor PPH	90	83	tidak tercapai
2.	Rata-rata Konsumsi Energi (KKal/Kap/hari)	2.000	2.000	tercapai
3.	Rata-rata Ketersediaan Energi (KKal/Kap/hari)	2.200	2.025	tidak tercapai
4.	Jumlah Desa Mandiri Pangan	1	13	tercapai
5.	Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat	4	28	tercapai
6.	Jumlah Desa P2KP (Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan)	10	78	tercapai
7.	Peningkatan Produksi Tebu (Kabupaten yang Memiliki Areal Penanaman Tebu) (ton)	16.500	14.033,1	tidak tercapai
8.	Jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) penerima raskin (KK)	107.317	107.317	tercapai
9.	Produksi Perikanan Tangkap (ton)	24.700,45	26.710,12	tercapai
10.	Produksi Perikanan Budidaya (ton)	42.441	39.195	tidak tercapai

Sumber : Bappeda Kabupaten Pati, Tahun 2016

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari sasaran atau indikator yang berjumlah 10 (sepuluh), yang masih perlu penekanan untuk ditindaklanjuti melalui penguatan beberapa aspek mulai perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan serta evaluasi secara simultan agar sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dapat terealisasi adalah terkait peningkatan skor PPH, peningkatan rata-rata ketersediaan energi, peningkatan produksi tebu guna mendukung kecukupan gula domestik dan peningkatan produksi perikanan budidaya.

## 2. Gizi

Gizi sangat dibutuhkan untuk membentuk kualitas sumber daya manusia yang memadai. Pengarusutamaan konsep seribu hari pertama kehidupan dalam perencanaan SDM berkualitas harus terus dikampanyekan kepada khalayak agar pesan penting yang terkandung didalamnya dapat dengan mudah masuk dalam pemahaman masyarakat secara lebih luas.

Balita membutuhkan gizi yang memadai sejak seribu hari pertama kehidupannya yaitu sejak dari tahap konsepsi dalam kandungan hingga pada usia 2 (dua) tahun anak dimana pada masa-

masa inilah proses perkembangan otak anak berlangsung secara optimal.

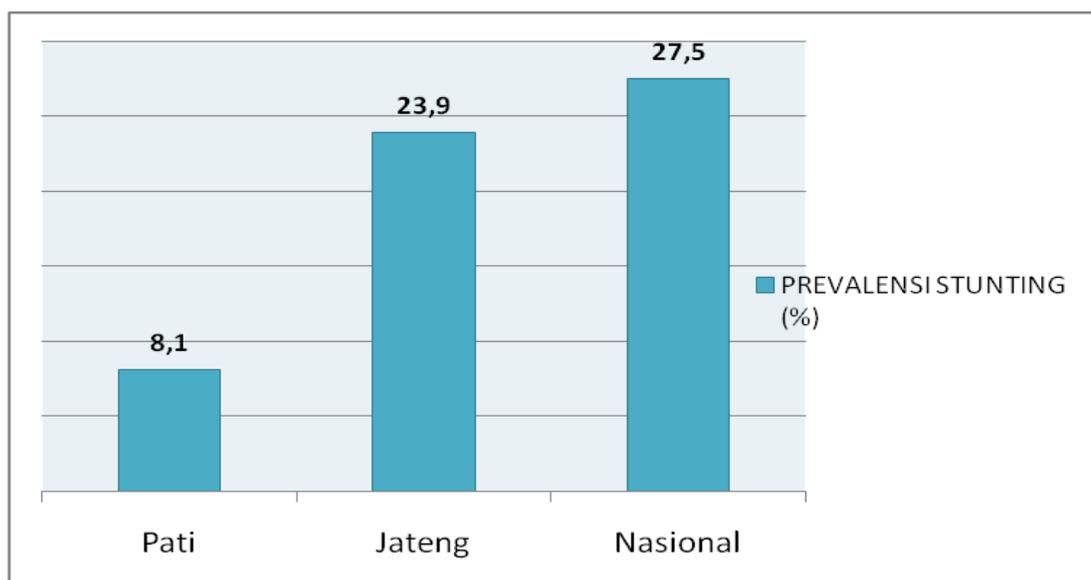
Permasalahan gizi biasanya muncul pada kelompok rumah tangga miskin di pedesaan yaitu terkait pada konsumsi pangan beragam, gizi seimbang, keamanan pangan serta tingkat kecukupan gizi. Kekurangan asupan gizi akan berakibat pada terganggunya proses pertumbuhan fisik anak, perkembangan motorik dan gangguan perkembangan kognitif yang nantinya akan menimbulkan masalah kemampuan belajar anak.

#### a. Prevalensi Pendek (*Stunting*) pada Anak Balita di Kabupaten Pati

Indikasi *stunting* salah satunya dapat diketahui melalui berat badan dan panjang/tinggi badan bayi baru lahir. Anak dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) kurang dari 2500 gram dan panjang/tinggi badan kurang dari 48 cm akan berpotensi *stunting*. Agar anak tidak mengalami *stunting*, tidak terkena penyakit degeneratif dini, tidak terkena gizi buruk dan gizi kurang maka berat badan bayi lahir minimal 3000 gram dan panjang badan 50 cm.

Prevalensi atau tingkat kejadian *stunting* di Kabupaten Pati relatif lebih rendah bila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional. Berikut perbandingan *stunting* Kabupaten Pati terhadap Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.

**Grafik 2.8.**  
**Kondisi Stunting Kabupaten Pati, Jawa Tengah dan Nasional**  
**Tahun 2016**

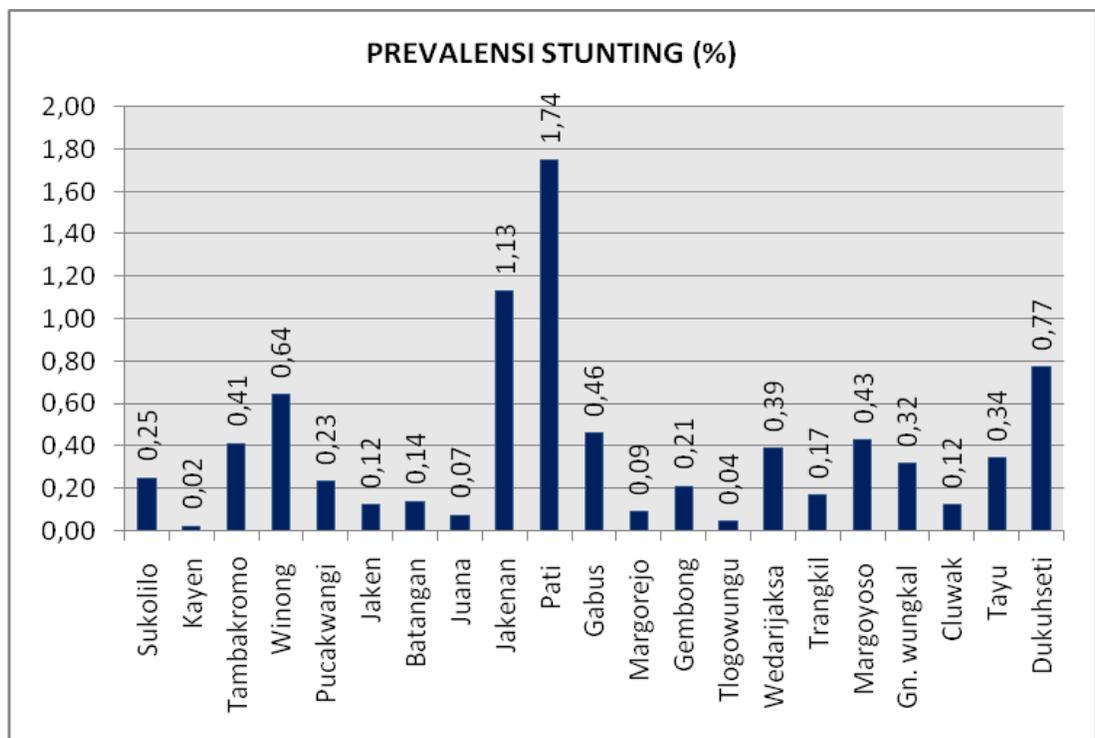


Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pati, Tahun 2017

Ada perbedaan mendasar dalam penghitungan prevalensi *stunting* antara Kabupaten Pati dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Kabupaten Pati dalam penghitungan prevalensinya menggunakan hasil data penimbangan serentak, sementara Provinsi Jawa Tengah dan Nasional menggunakan hasil Survey Pemantauan Status Gizi (PSG) sehingga ada perbedaan hasil penghitungan prevalensi. Melalui PSG, prevalensi *stunting* di Kabupaten Pati sebesar 9,4% atau lebih tinggi 1,3%. Namun angka ini belum bisa menggambarkan kondisi *stunting* di wilayah masing-masing kecamatan yang ada.

Adapun untuk prevalensi *stunting* di Kabupaten Pati Tahun 2016 berdasarkan wilayah kecamatan adalah sebagaimana Grafik berikut.

**Grafik 2.9.**  
**Kondisi Stunting Kabupaten Pati Menurut Kecamatan**  
**Tahun 2016**



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pati, Tahun 2017

Berdasarkan pada data Grafik 2.9 nampak bahwa Kecamatan Pati memiliki prevalensi *stunting* tertinggi di wilayah Kabupaten Pati yaitu sebesar 1,74%, sedangkan Kecamatan Kayen menduduki angka prevalensi *stunting* terendah sebesar 0,02%. Kasus *stunting* di Kecamatan Pati tertinggi mengingat jumlah penduduknya yang paling banyak sehingga probabilitas terjadinya *stunting* akan

semakin tinggi, dan wilayah yang berpenduduk rendah atau tingkat kelahiran rendah akan relatif lebih rendah probabilitas *stunting* nya.

**b. Perbandingan Prevalensi Gizi Kurang dan Buruk pada Anak Balita (BB/TB)**

Indikator Berat Badan menurut Tinggi Badan (BB/TB) menggambarkan status gizi akut sebagai akibat dari keadaan yang berlangsung dalam waktu singkat karena penyakit diare atau penyakit lainnya. Kejadian ini akan mempercepat penurunan berat badan anak sehingga anak menjadi kurus dan tidak lagi proporsional dengan tinggi badannya.

**1) Pemantauan Kasus Gizi Buruk**

Pelaksanaan pemantauan kasus gizi buruk tertintegrasi dalam kegiatan pemantauan pertumbuhan anak di Posyandu. Berikut adalah hasil pemantauan kasus gizi buruk yang terjadi di wilayah Kabupaten Pati sebagaimana Tabel 2.7.

**Tabel 2.7.**  
**Kasus Balita dengan Gizi Buruk Kabupaten Pati**  
**Tahun 2011-2016**

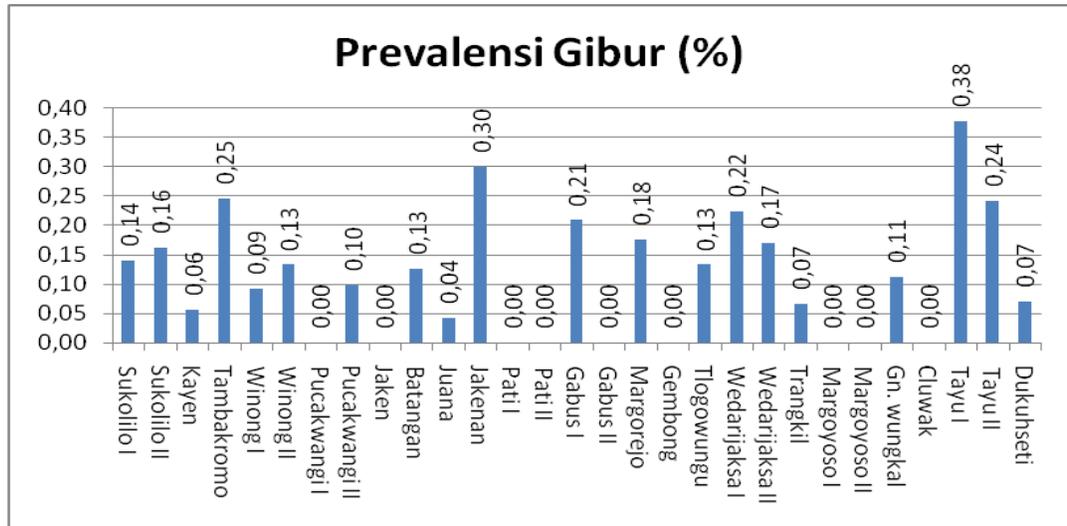
NO	TAHUN	KASUS GIZI BURUK BALITA	
		ABSOLUT	%
1	2011	185	0,21
2	2012	173	0,20
3	2013	102	0,11
4	2014	85	0,10
5	2015	71	0,08
6	2016	94	0,10

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pati, Tahun 2017

Ada kecenderungan terjadi penurunan kasus anak dengan kondisi gizi buruk/kurang yang semula pada Tahun 2011 terdapat kasus sebanyak 185 kejadian atau memiliki prevalensi sebesar 0,21% menjadi 94 kasus atau 0,10% pada Tahun 2016. Pada Tahun 2016 ini kondisinya lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang hanya memiliki prevalensi gizi buruk sebesar 0,08% atau dengan kasus gizi buruk sebesar 71 kasus.

Berikut adalah gambaran kejadian gizi buruk anak balita di Kabupaten Pati Tahun 2016 menurut wilayah kecamatan sebagaimana Grafik 2.10.

**Grafik 2.10.**  
**Prevalensi Balita Gizi Buruk Kabupaten Pati Menurut Kecamatan Tahun 2016**



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pati, Tahun 2017

Wilayah Puskesmas Kecamatan Tayu I dan Kecamatan Jakenan memiliki kasus balita gizi buruk tertinggi yaitu masing-masing sebesar 0,38% dan 0,30%. Sedangkan wilayah kerja puskesmas di kecamatan yang tidak terjadi kasus balita gizi buruk atau dengan prevalensi gibur 0% meliputi Puskesmas Pucakwangi I, Puskesmas Jaken, Puskesmas Pati I dan Pati II, Puskesmas Gabus II, Puskesmas Gembong, Puskesmas Margoyoso I dan Margoyoso II serta Puskesmas Cluwak.

## 2) Penanganan Kasus Gizi Buruk

Posyandu sebagai pusat pelayanan kesehatan terpadu memiliki peran yang sangat penting dalam identifikasi dini terhadap kemungkinan munculnya kasus gizi buruk. Balita yang teridentifikasi menderita gizi buruk di posyandu selanjutnya dirujuk ke puskesmas terdekat dan/atau ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan dan pengobatan selanjutnya.

Berikut Tabel 2.8 adalah gambaran kinerja pelayanan terkait program peningkatan gizi masyarakat (Pilar I) di Kabupaten Pati Tahun 2016.

**Tabel 2.8.**  
**Penanganan Kasus Balita dengan Gizi Buruk Kabupaten Pati**  
**Tahun 2011-2016**

NO	PROG/KEGIATAN/INDIKATOR	CAPAIAN 2015	TAHUN 2016		
			TARGET	CAPAIAN	STATUS
<b>A</b>	<b>PROG. PELAYANAN KESEHATAN</b>				
<b>I</b>	<b>Kegiatan Koordinasi Pelayanan Gizi Masyarakat</b>				
1	% bayi 0-5 bulan 29 hari mendapat ASI Eksklusif	66,59	48	74,2	tercapai
2	% bayi 6 bulan mendapat ASI Eksklusif	54,85	44	56,22	tercapai
3	% bumil KEK mendapat PMT	30,38	50	63,53	tercapai
4	% bumil mendapat TTD 90 tablet	89,92	85	89,53	tercapai
5	% balita kurus mendapat PMT	4,7	75	22,4	tidak tercapai
6	% bayi mendapat IMD	tad	41	86,29	tercapai
7	% ibu hamil anemia	17,4	30	14,48	di bawah target
8	% bayi BBLR	3,42	9	3,48	di bawah target
9	Prev balita BB kurang (underweight, BB/U)	6,14	16	6,72	di bawah target
10	Prev balita kurus (wasting, BB/TB)	3,11	9	4,24	di bawah target
11	Prevalensi balita pendek (stunting, TB/U)	7,09	24,5	8,1	di bawah target
12	Prevalensi balita BB lebih (overweight, BB/U)	0,88	<4	1,07	di bawah target
13	% balita ditimbang (D/S)	86,44	82	85,96	tercapai

NO	PROG/KEGIATAN/INDIKATOR	CAPAIAN 2015	TAHUN 2016		
			TARGET	CAPAIAN	STATUS
14	Kab/Kota ada peraturan ttg ASI	ada	ada	ada	tercapai
15	Cakupan garam beryodium	82,9	81	79,91	tidak tercapai
16	Ratri mendapat TTD	0	15	100	tercapai
17	% Balita mendapat kapsul vit A	99,99	100	100	tercapai
<b>II</b>	<b>Koordinasi Pelayanan Kesehatan Ibu &amp; Anak</b>				
18	% kunjungan neonatal (KN1)	98,47	100	100	tercapai
19	% puskesmas penjangkaran anak kelas 1, 7, 10	100	100	100	tercapai
20	% puskesmas melakukan kegiatan kesehatan remaja	100	100	100	tercapai
21	% persalinan di faskes oleh nakes	98,29	100	100	tercapai
22	% bumil dapat pelayanan antenatal 4 kali	90,88	100	94,39	tidak tercapai
23	% puskesmas melaksanakan P4K	100	100	100	tercapai
24	% puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil	100	100	100	tercapai

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pati, Tahun 2017

## B. Capaian Pembangunan Pangan dan Gizi

Berikut disampaikan hasil capaian pembangunan yang tertuang dalam roadmap Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Pati Tahun 2011-2015 pada akhir fase pelaksanaan yaitu pada Tahun 2015 sebagaimana Tabel 2.9.

**Tabel 2.9.**  
**Capaian Pilar Pembangunan Pangan dan Gizi**  
**Kabupaten Pati Tahun 2015**

No	Sasaran / Indikator	Tahun 2015		Status Capaian
		Target	Realisasi	
<b>Pilar I : Perbaikan Gizi Masyarakat</b>				
<i>Sasaran : meningkatnya cakupan ASI eksklusif, D/S, KN dan K4</i>				
1.	Persentase balita gizi kurang (BB/U)	7,30	5,59	tercapai
2.	Persentase balita gizi buruk	0,7	0,08	tercapai
3.	Persentase balita 6-59 bulan mendapat kapsul Vitamin A	100	99,99	tercapai
4.	Persentase bayi usia 0-6 bulan mendapat ASI Eksklusif	80	72,06	tidak tercapai
5.	Persentase bayi 6-12 bulan dan anak 1-5 tahun mendapat kapsul vitamin	100	99,99	tercapai
6.	Jumlah ibu hamil KEK mendapat PMT ( %)	100	30,38	tidak tercapai
7.	Persentase ibu hamil mendapat tablet Fe 90 tablet	90	89,92	tercapai
8.	Persentase pemeriksaan sebelum kelahiran (Ante Natal Care)	100	100	tercapai
9.	Jumlah rumah tangga yang mengkonsumsi garam beryodium (%)	90	82,9	tidak tercapai
10.	Kunjungan Neonatal Pertama (KN1)	99	94,69	tidak tercapai
11.	Kunjungan Ibu Hamil Ke 4 (K4)	94	96,03	tercapai
<b>Pilar II : Peningkatan Aksesibilitas Pangan Beragam</b>				
<i>Sasaran : meningkatnya tingkat keragaman konsumsi dan skor PPH</i>				
1.	Skor PPH	90	83	tidak tercapai
2.	Rata-rata Konsumsi Energi (KKal/Kap/hari)	2.000	2.000	tercapai
3.	Rata-rata Ketersediaan Energi (KKal/Kap/hari)	2.200	2.025	tidak tercapai
4.	Jumlah Desa Mandiri Pangan	1	13	tercapai

No	Sasaran / Indikator	Tahun 2015		Status Capaian
		Target	Realisasi	
5.	Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat	4	28	tercapai
6.	Jumlah Desa P2KP (Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan)	10	78	tercapai
7.	Peningkatan Produksi Tebu (Kabupaten yang Memiliki Areal Penanaman Tebu) (ton)	16.500	14.033,1	tidak tercapai
8.	Jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) penerima raskin (KK)	107.317	107.317	tercapai
9.	Produksi Perikanan Tangkap (ton)	24.700,45	26.710,12	tercapai
10.	Produksi Perikanan Budidaya (ton)	42.441	39.195	tidak tercapai
<b>Pilar III : Peningkatan Pengawasan Mutu dan keamanan Pangan</b>				
<b>Sasaran :</b> <i>meningkatkan cakupan jajanan anak sekolah yang memenuhi syarat produk PIRT tersertifikasi.</i>				
1.	Jumlah Sekolah Dasar yang Mendapatkan Pembinaan PJAS	25	5	tidak tercapai
2.	Jumlah Produk IRTP (Industri Rumah Tangga Pangan) yang Bersertifikat	23	150	Tercapai
3.	Jumlah Tenaga Penyuluh dan Pengawas Keamanan Pangan Sesuai Standar (1/40.000 penduduk)	10	0	tidak tercapai
4.	Jumlah Tenaga Penyuluh Keamanan Pangan	6	0	tidak tercapai
5.	Persentase Kantin Sekolah yang Mendapat Pembinaan Keamanan Pangan	25	1	tidak tercapai
<b>Pilar IV : Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)</b>				
<b>Sasaran :</b> <i>meningkatkan jumlah rumah tangga yang melakukan PHBS.</i>				
1.	Persentase Rumah Tangga Melakukan PHBS	85,59	72,74	tidak tercapai
2.	Persentase PHBS Rumah Tangga Strata Utama dan Paripurna > 60%	85,59	72,74	tidak tercapai

No	Sasaran / Indikator	Tahun 2015		Status Capaian
		Target	Realisasi	
<b>Pilar V : Penguatan Kelembagaan Pangan dan Gizi</b>				
<b>Sasaran :</b> (1) meningkatnya jumlah kabupaten/kota yang mempunyai SKPD bidang pangan dan gizi; (2) meningkatnya peraturan perundangan pangan dan gizi; (3) meningkatnya tenaga D3 Gizi Puskesmas dan PPL Kecamatan.				
1.	Jumlah Kelembagaan Pangan dan Gizi di Daerah	1	2	tercapai
2.	Jumlah Tenaga Kesehatan Gizi di Puskesmas	29	19	tidak tercapai
3.	Jumlah Kecamatan yang Mempunyai Tenaga PPL Pertanian yang Mengikuti Pelatihan Pangan dan Gizi	21	13	tidak tercapai

### C. Tantangan dan Hambatan

Dalam upaya mencapai tujuan pembangunan pangan dan gizi yaitu terwujudnya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dengan prioritas penanganan pada aspek stok kesehatan (preventif) berupa peningkatan pemahaman dan kesadaran bagi masyarakat tentang pentingnya asupan gizi yang baik dan berimbang khususnya ditujukan pada 1000 (seribu) hari pertama kehidupan, banyak kendala maupun tantangan yang harus dilalui.

Melalui identifikasi permasalahan guna menemukenali pola/jenis tantangan dan hambatan, baik yang bersifat internal maupun eksternal, yang akan dihadapi guna mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan, diharapkan dapat meminimalkan dampak negatif atas kendala dan tantangan yang dapat membiaskan arah tujuan yang hendak dicapai. Pemahaman terhadap jenis tantangan dan hambatan akan sangat menentukan dalam memberikan intervensi yang bersifat spesifik (dari aspek kesehatan) dan intervensi sensitif (aspek pendukung atau non kesehatan yang meliputi daya beli masyarakat, ketersediaan pangan, aksesibilitas pangan bagi kelompok miskin, rendahnya pendidikan yang berpengaruh pada pemahaman pentingnya asupan gizi terutama pada kaum ibu/pengasuh anak dan kelompok usia menikah yang terlalu muda).

Oleh karena itu, mengacu pada permasalahan di bidang pangan dan gizi yang harus dipecahkan dan dituntaskan serta adanya tantangan yang harus dijawab dengan hasil yang memuaskan (sebagaimana isu-isu

strategis terkait pembangunan pangan dan gizi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2017-2022, kebijakan pangan dan gizi Provinsi Jawa Tengah serta kebijakan nasional terkait), maka ada beberapa hal yang akan menjadi tantangan dan hambatan adalah seperti rincian berikut.

### **1. Tantangan Pembangunan Pangan dan Gizi**

- a. Masalah gizi yang bersifat trans-generasi;
- b. Masih adanya kasus gizi buruk dan stunting;
- c. Masih banyaknya masyarakat yang belum memahami pentingnya mengkonsumsi makanan bergizi ;
- d. Masih banyaknya wilayah yang kesulitan akses air bersih;
- e. SDA penghasil bahan pangan yang semakin terbatas;
- f. Masih rendahnya koordinasi guna menjalankan pendekatan multisektor;
- g. Makin meningkatnya konsumsi kalori sebagai sumber masalah obesitas;
- h. Makin sengitnya persaingan antara produk pangan lokal dengan produk pangan impor;
- i. Adanya tuntutan produksi pangan yang semakin efisien seiring perkembangan teknologi produksi pangan;
- j. Sulitnya mengubah perilaku hidup tidak sehat masyarakat;
- k. Peningkatan peran Dewan Ketahanan Pangan;
- l. Pengembangan sistem informasi kewaspadaan pangan dan gizi;
- m. Peningkatan sinergitas program/kegiatan yang bersifat multisektor.

### **2. Hambatan Pembangunan Pangan dan Gizi**

- a. SDM Kesehatan/gizi terbatas (jumlah & kompetensi);
- b. Kesadaran bumil terhadap asupan makanan bergizi dan pemeriksaan rutin masih rendah;
- c. Masih banyak Balita kurang/belum mendapat PMT;
- d. Pelayanan kesehatan yang masih kurang baik/maksimal;
- e. Masih tingginya angka kemiskinan;
- f. Masih rendahnya pendidikan dan pengetahuan gizi masyarakat;
- g. Peran kelembagaan pangan belum optimal;
- h. Standar mutu dan keamanan pangan kurang dipahami oleh produsen makan;

- i. Masih banyaknya Pemanfaatan bahan kimia dalam produksi makanan;
- j. Masih banyak masyarakat yang tidak menjalankan PHBS;
- k. Sanimas yang masih banyak belum layak;
- l. Masih lemahnya koordinasi antar lembaga (OPD) terkait;
- m. Pendataan bidang pangan yang belum optimal;
- n. Monev terkait progres capaian di bidang pangan dan gizi belum dilakukan secara terpadu.

### **BAB III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI**

#### **A. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Pangan dan Gizi**

Kebijakan di bidang pangan dan gizi dalam 5 (lima) tahun ke depan diarahkan pada aspek produksi, konsumsi, aksesibilitas dan pelayanan kesehatan. Hal ini terkait dengan arah kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 khususnya pada Misi ke dua yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan dan Misi ke enam yaitu meningkatkan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pertanian, perdagangan dan industri.

##### **1. Produksi**

Arah kebijakan difokuskan pada upaya untuk meningkatkan ketersediaan bahan pangan di lumbung-lumbung pangan di pedesaan. Dengan semakin menguatnya stok pangan di masyarakat dan pemerintah, dapat menekan instabilitas harga pangan di daerah karena hal ini apabila terjadi dapat mengganggu daya beli masyarakat golongan miskin sebagai konsumen dan daya beli petani sebagai produsen yang muaranya pada semakin menurunnya tingkat akses masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan pangan.

Strategi untuk mendukung ketersediaan pangan daerah adalah dengan meningkatkan produktivitas sektor pertanian sebagai basis produksi pangan. Produksi pangan lokal harus terus diupayakan untuk ditingkatkan guna menjamin kebutuhan pangan oleh masyarakat setempat. Selain produksi, peningkatan distribusi produk pangan juga akan mendorong peningkatan stok pangan daerah.

## **2. Konsumsi**

Arah kebijakan untuk konsumsi pangan adalah dengan peningkatan kualitas dan kuantitas produk pangan yang terkendali dan terpantau oleh pemerintah maupun masyarakat. Hal ini untuk menjamin kepastian bahwa sumber pangan yang tersedia dapat dengan mudah didapatkan untuk kebutuhan konsumsi oleh masyarakat, lebih-lebih untuk wilayah yang rentan terjadinya bencana alam.

Strategi dengan peningkatan kualitas dan kuantitas konsumsi masyarakat yang terkendali dan terarah melalui pemantauan secara intensif dari pemerintah bekerja sama dengan masyarakat. Selain itu perlu juga mendorong upaya promosi konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman serta peningkatan diversifikasi konsumsi berbasis pangan lokal.

## **3. Aksesibilitas**

Arah kebijakan terkait dengan peningkatan sistem distribusi pangan dengan terus menyempurnakan pengaturan distribusinya hingga pada pengaturan tata niaga produk pangan termasuk di antaranya kemudahan akses informasi bahan pangan beragam sehingga dapat membantu mempermudah masyarakat untuk konsumsi pangan.

Strategi dengan peningkatan penguasaan akses dan informasi pangan dan gizi, efisiensi fasilitas pemasaran, stabilisasi pasokan dan harga pangan, penanganan daerah rawan pangan, bantuan pangan untuk rumah tangga miskin, distribusi dan sistem logistik kebutuhan pangan sehingga dapat terus mendorong peningkatan kualitas konsumsi pangan oleh masyarakat.

## **4. Pelayanan Kesehatan**

Arah kebijakan melalui optimalisasi proses pelayanan kesehatan pada ibu dan bayi saat persalinan hingga menyusui, posyandu yang terintegrasi, peningkatan kualitas sanitasi dan pemenuhan air bersih, pemberian imunisasi dan vitamin serta jaminan kesehatan.

Strategi yang dilakukan adalah dengan peningkatan/ pengembangan sarana dan prasarana dasar beserta tenaga kesehatan yang memadai, peningkatan komunikasi, informasi, edukasi masyarakat untuk kesehatan promotif dan preventif, peningkatan pelayanan KB serta cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan.

## **B. Peran dan Dampak Pangan dan Gizi dalam Pembangunan**

### **1. Peran dan Dampak Pangan dalam Pembangunan**

Pangan merupakan kebutuhan mendasar dalam kehidupan manusia dan sekaligus sebagai hak asasi manusia untuk memenuhi kebutuhan akan konsumsi pangan. Program swasembada pangan yang dulu pernah dilaksanakan dapat kembali diadopsi dalam kebijakan pemerintah untuk mendukung ketahanan pangan dalam jangka pendek dan bahkan dapat diarahkan untuk mendukung kebijakan kemandirian pangan dalam jangka panjang.

Ketahanan pangan tidak hanya fokus pada penyediaan stok pangan yang memadai dan beragam, namun kemudahan akses termasuk akses informasi pangan, kualitas dan keamanan produk pangan. Menjaga dan memastikan sektor hulu sebagai penghasil bahan pangan dapat dilakukan oleh pemerintah daerah melalui berbagai fasilitasi dan membantu kemudahan dalam pemenuhan kebutuhan petani akan saprodi pertanian sehingga berbagai kendala atau kesulitan di lapangan dapat diminimalisir agar produksi pertanian dapat terus dioptimalkan. Pemanfaatan berbagai teknologi pertanian bagi petani untuk meningkatkan produktivitas pertanian juga harus terus didorong untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat yang terus meningkat serta mendukung keamanan stok pangan bagi masyarakat.

Peningkatan koordinasi antar stakeholder dalam merumuskan atau menyusun kebijakan terkait pembangunan pangan dan gizi harus terus dilakukan guna menjaga sinergitas antar sektor sehingga tercipta integrasi sistem pembangunan pangan dan gizi. Hal ini apabila dapat dijalankan secara intensif dan berkelanjutan tentu akan dapat meningkatkan efektivitas kebijakan yang mengarah pada target/sasaran dan meningkatkan efisiensi dalam konteks penganggaran.

### **2. Peran dan Dampak Gizi dalam Pembangunan**

Pemenuhan gizi sangat terkait dengan upaya mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Hal ini yang akan dijadikan fokus dalam pencapaian tujuan pembangunan bidang pangan dan gizi.

Fokus perbaikan gizi adalah pada 1000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan yang terdiri dari 270 hari masa kehamilan dan 730 hari pasca kelahiran hingga anak usia 2 tahun. Periode ini merupakan periode emas untuk masa tumbuh kembang anak yang paling optimal

yang akan menentukan kualitas hidup baik secara fisiologis maupun psikologis bagi masa kehidupan selanjutnya. Rentang 1000 hari pertama kehidupan menjadi periode yang sensitif karena akibat yang ditimbulkan terhadap bayi pada masa ini akan bersifat permanen dan tidak dapat dikoreksi. Lingkungan sangat berpengaruh terhadap periode sensitif yang akan menentukan kualitas hidup anak hingga dewasa baik terkait ukuran tubuh, kegemukan maupun penyakit degeneratif dan indikator kesehatan yang lain.

### **3. Dampak Pangan dan Gizi terhadap Penyakit**

Konsumsi pangan yang tidak mendasarkan pada kualitas dan kecukupan pangan akan berpengaruh terhadap asupan gizi pada tubuh manusia. Asupan gizi yang kurang berarti akan menimbulkan kekurangan gizi yang menjadi awal penyebab kemungkinan masuknya berbagai jenis penyakit.

Kekurangan pangan dan gizi pada periode sensitif (1000 HPK) akan berdampak pada kejadian *stunting* dan rentan terhadap penyakit tidak menular (PTM).

Pemenuhan pangan dan gizi secara seimbang juga dapat mencegah terjadinya obesitas. Antara asupan makanan dan energi yang dikeluarkan haruslah seimbang sehingga resiko munculnya PTM akibat faktor kegemukan dapat dihindarkan.

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyampaikan bahwa PTM seperti penyakit jantung, stroke, kanker, diabetes mellitus, penyakit paru kronik dan penyakit kronik lainnya menjadi penyumbang penyebab kematian manusia sebesar 63%.

Dampak yang ditimbulkan dari PTM secara sosial dan ekonomi sangat besar. Dibutuhkan biaya yang besar untuk penanganan kasus PTM dan memerlukan waktu penyembuhan yang relatif lama sehingga akan berpengaruh terhadap produktivitas manusia sekaligus produktivitas masyarakat dan bangsa secara lebih luas.

## **BAB IV. RENCANA AKSI PANGAN DAN GIZI**

### **A. Pendekatan Multi Sektor**

Skema pembangunan pangan dan gizi untuk lima tahun ke depan dilakukan dengan pendekatan multi sektor, tidak hanya fokus pada aspek kesehatan, namun aspek non kesehatan (faktor pendukung) akan menjadi faktor penentu keberhasilan pencapaian tujuan yaitu untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas.

Mengacu pada konsep pendekatan multi sektor sebagaimana dikemukakan oleh Lancet (2013), ada dua bentuk intervensi yaitu pada aspek kesehatan (intervensi spesifik) yang memberikan kontribusi pada perbaikan status gizi sebesar 30%. Sedangkan intervensi kedua dalam upaya perbaikan status gizi adalah intervensi sensitif yang berpengaruh pada pencapaian perbaikan gizi sebesar 70%.

Pengertian intervensi spesifik adalah intervensi yang dilakukan secara langsung terhadap sasaran yang rawan, dan akan efektif apabila cakupannya ditingkatkan, pada umumnya dilakukan oleh sektor kesehatan dan bersifat jangka pendek. Sedangkan intervensi sensitif adalah intervensi yang dilakukan secara tidak langsung di luar sektor kesehatan, yang direncanakan secara khusus dan terpadu dengan kegiatan spesifik untuk perbaikan masalah gizi, dengan sasaran masyarakat umum, dan bersifat jangka panjang.

Berikut adalah gambaran mekanisme kerja dari intervensi spesifik dan intervensi sensitif sebagaimana Modifikasi Lancet (2013) terkait kerangka pendekatan multi sektor.

**Gambar 4.1**  
**Kerangka Pendekatan Multi Sektor**



Source: The Lancet, 2013: Executive Summary of The Lancet Maternal and Child Nutrition Series

Dalam kerangka pendekatan multisektor sebagaimana gambar 4.1 menunjukkan bahwa penentuan 1000 HPK sebagai fokus pembentukan kualitas SDM ke depan akan dilakukan melalui dua intervensi besar yaitu intervensi spesifik yang terdiri dari program : kesehatan remaja dan gizi ibu pra hamil, PMT pada bumil, suplemen gizi mikro, pemberian ASI dan makanan pendamping ASI, PMT pada anak, penganekaragaman makanan, perilaku pemberian makanan dan stimulasi, penanggulangan gizi buruk akut, manajemen pencegahan penyakit dan intervensi gizi dalam kedaruratan; intervensi sensitif meliputi pendekatan program : pertanian dan ketahanan pangan, jaminan sosial nasional, perkembangan anak usia dini, kesehatan mental ibu, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pendidikan dalam kelas, sanitasi dan air bersih, pelayanan kesehatan dan KB. Disamping itu ada faktor pendukung lain yang disebut

sebagai membangun lingkungan “pemungkin/*enabling*” yang mempengaruhi keberhasilan intervensi gizi spesifik dan sensitif antara lain meliputi evaluasi yang tepat dalam pelaksanaan program, dukungan advokasi yang baik, koordinasi vertikal dan horisontal yang kuat, akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan program, fasilitasi regulasi dan peraturan perundang-undangan, kepemimpinan, investasi untuk peningkatan kapasitas dan mobilisasi sumber daya lokal.

## **B. Intervensi Pilar Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG)**

Guna mendukung pencapaian hasil sebagaimana keluaran Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG) maupun Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Provinsi Jawa Tengah, maka RAD-PG Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 diarahkan untuk pencapaian keluaran :

1. Penurunan prevalensi gizi buruk dan gizi kurang anak balita;
2. Penurunan prevalensi *stunting* anak balita;
3. Penurunan populasi jumlah penduduk dengan asupan energi/kalori kurang dari 1.400 kkal/kapita/hari.

Sebagai langkah sistematis dalam pembangunan pangan dan gizi, RAD-PG Kabupaten pati Tahun 2017-2022 disusun berdasarkan pilar-pilar sebagaimana RAD-PG terdahulu dengan modifikasi tambahan yang disesuaikan dengan arah tujuan yang telah ditetapkan dengan pilar sebagai berikut :

1. Perbaikan Gizi Masyarakat (prioritas pada ibu pra hamil, ibu hamil dan anak dengan fokus pada 1000 HPK);
2. Peningkatan Akses Pangan Beragam;
3. Peningkatan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan;
4. Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
5. Penguatan Kelembagaan Pangan dan Gizi.

Intervensi dalam bentuk pilar-pilar di atas akan dilaksanakan oleh OPD terkait sehingga harapannya melalui program/kegiatan yang ada di masing-masing OPD tersebut dapat berkontribusi pada pencapaian hasil yang telah direncanakan.

Berikut adalah Target Capaian Kinerja RAD-PG Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 sebagaimana Tabel 4.1

**Tabel 4.1.**

**Target Capaian Kinerja RAD-PG Kabupaten Pati Tahun 2017-2022**

<b>Input</b>	<b>Output</b>	<b>Indikator outcome</b>	<b>Capaian 2016</b>	<b>Target 2022</b>
Program dan Kegiatan OPD terkait	1. Ketersediaan pangan, akses ekonomi dan pemanfaatan pangan yang memadai;	1) Produksi padi (ton)	666.344	707.744
		2) Produksi jagung (ton)	168.380	171.489
	2. Konsumsi makanan yang berpedoman pada gizi seimbang terutama pada kelompok rentan yaitu kelompok 1000 HPK, remaja perempuan, ibu menyusui, dan Balita;	3) Produksi kedelai (ton)	6.529	4.975
		4) Produksi tebu (ton)	736.744	782.069
		5) Produksi gula (ton)	59.860	71.476
		6) Produksi daging (ton)	6.359,74	7.1621,04
		7) Produksi ikan: (a). Perikanan tangkap (ton), (b). Perikanan budidaya (ton)	27.782	31.011
	3. Penanggulangan gizi buruk akut;	8) Produksi garam (ton)	42.036	46.347
	4. Pemantauan dan stimulasi tumbuh kembang;	9) Skor PPH	16.869	478.563
		10) Tingkat konsumsi kalori (kkal/kap/th)	83,5	88
	5. Akses terhadap Pelayanan kesehatan dan KB;	11) Konsumsi ikan (kg/kap/th)	2.050	2.215
		12) Prevalensi anemia pada ibu hamil (%)	26	40,2
	6. Jaminan terhadap akses kesehatan dan sosial;	13) Persentase bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR) (%)	14,48	16,5
7. Pendidikan dan pemberdayaan perempuan, serta perkembangan anak usia dini;		14) Pencegahan dan	3,48	3,75
8. Terjadi peningkatan pengetahuan gizi dan kesehatan pada remaja, wanita usia subur dan ibu;	15) Pencegahan dan	74,2	65,0	
	9. Pencegahan dan			

<b>Input</b>	<b>Output</b>	<b>Indikator outcome</b>	<b>Capaian 2016</b>	<b>Target 2022</b>
	manajemen penyakit infeksi;	14) Persentase bayi <6 bulan mdpt ASI eksklusif (%)	6,72	6,2
	10. Peningkatan sanitasi dan air bersih;	15) Prevalensi balita <i>underweight</i> (%)	4,24	3,7
	11. Peningkatan pemahaman dan pelaksanaan advokasi yang strategis;	16) Prevalensi balita kurus ( <i>wasting</i> ) (%)	8,1	7,8
	12. Koordinasi vertikal dan horizontal;	17) Prevalensi balita pendek dan sangat pendek ( <i>stunting</i> ) (%)	n.a	n.a
	13. Akuntabilitas, regulasi insentif, peraturan perundang-undangan	18) Prevalensi berat badan lebih dan obesitas pada penduduk usia >18 tahun		
	14. Investasi dan mobilitasi kapasitas;			
	15. Monitoring dan evaluasi tepat guna.			

### C. Program dan Kegiatan serta Jumlah Indikator RAD-PG

Berikut Tabel Program dan Kegiatan dalam RAD-PG Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 sebagaimana Tabel 4.2.

**Tabel 4.2.**

#### **Program dan Kegiatan RAD-PG Kabupaten Pati Tahun 2017-2022**

<b>No</b>	<b>Pilar</b>	<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Jumlah Indikator</b>
1	Perbaikan Gizi Masyarakat	1) Pelayanan Kesehatan	Koordinasi Pelayan Gizi Masyarakat	17
			Koordinasi Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	7
		2) Pencegahan dan Penanggulang-an Penyakit	Surveillance Epidemiologi, Penanganan KLB & Bencana, Penyiapan Pelayanan	2

<b>No</b>	<b>Pilar</b>	<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Jumlah Indikator</b>
			Kesehatan Haji dan Imunisasi	
		3) Kesehatan Lingkungan	Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat	1
			Upaya Penyehatan Lingkungan Pemukiman	2
2	Peningkatan Aksesibilitas Pangan Beragam	1) Peningkatan Ketahanan Pangan	Pemantauan & analisis harga pangan pokok	1
			Peningkatan akses pangan masyarakat	1
			Peningkatan Kemandirian dan Penanganan Kerentanan Pangan Masyarakat	1
			Pengembangan DMP	1
			Penanganan Daerah Rawan Pangan	1
			Pengembangan cadangan pangan Kabupaten Pati	1
			Peningkatan Ketersediaan dan Cadangan Pangan Masyarakat	1
			Pengembangan model distribusi yang efisien	1
			Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat	1
		2) Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pengembangan Pengamekaragaman Konsumsi Pangan	1
		3) Pengembangan Diversifikasi dan Pola Konsumsi Pangan	Pengembangan Pemanfaatan Pekarangan dan Pengenalan Konsumsi Pangan B2SA	4
			Pengembangan Diversifikasi Pengolahan Pangan Berbasis Sumber	1

<b>No</b>	<b>Pilar</b>	<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Jumlah Indikator</b>
			Daya Lokal	
		4) Pengembangan Agribisnis	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	3
			Peningkatan Produksi Hortikultura (buah & sayuran)	1
			Penanaman dan intensifikasi tebu	2
			Peningkatan Produksi Peternakan	1
			Pengembangan Kesehatan Masyarakat Veteriner (KESMAVET) dan Kesejahteraan Hewan (KESRAWAN)	3
			Peningkatan Kinerja Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner (KESMAVET)	1
			Peningkatan mutu dan sertifikasi hasil produksi pertanian	1
		5) Pengembangan Perikanan Tangkap	Pengembangan dan pengelolaan perikanan tangkap	1
		6) Pengembangan Perikanan Budidaya	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	1
		7) Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	1
		8) Optimalisasi Pengolahan Dan Pemasaran Produk Perikanan	Peningkatan daya saing produk perikanan	1

<b>No</b>	<b>Pilar</b>	<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Jumlah Indikator</b>
			Fasilitasi penguatan & pengembangan pemasaran dalam negeri hasil perikanan	2
		9) Pengembangan Industri Agro, Kimia Dan Hasil Hutan	Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat lokal, regional dan nasional industri industri agro, kimia dan hasil hutan	1
		10) Peningkatan Logistik Daerah, Akses Pasar Dalam Negeri dan Pemberdayaan UDKM	Pembinaan lingkungan sosial	1
			Pemantauan stok, distribusi & harga Kepokmas maupun komoditi strategis lainnya	1
			Pembinaan dan peningkatan sarpras usaha dagang dan pasar tradisional	1
		11) Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa serta Jaringan Pengairan Lainnya	Pemeliharaan, perbaikan dan pembangunan prasarana dan sarana irigasi.	1
3	Peningkatan Pengawasan Mutu Dan Keamanan Pangan	1) Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya	Sampling dan pengujian Obat dan Makanan	3
			Pengawasan obat dan makanan	2
		2) Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Pengawasan Obat dan Makanan	7
		3) Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan	Pengawasan Barang Beredar dan Jasa	1

<b>No</b>	<b>Pilar</b>	<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Jumlah Indikator</b>
		Perdagangan Dalam Negeri		
		4) Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	Pembinaan mutu dan Keamanan pangan	3
			Pengembangan Sertifikasi dan Pengawasan Batas Maksimum Residu (BMR) pada Produk Pangan Segar	1
4	Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS)	1) Promosi dan Pemberdayaan	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	3
		2) Pendidikan Dasar	Koordinasi Pembinaan Kesiswaan	1
		3) Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan LH	Peningkatan Kapasitas Masyarakat Pedesaan dan warga sekolah dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	1
		4) Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	1
			Pembangunan Infrastruktur Tempat Pemrosesan Akhir Sampah	1
		5) Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, Serta Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pembangunan Infrastruktur SPAM Perdesaan	1
		6) Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi	Peningkatan penyediaan prasarana dan sarana air bersih	1

<b>No</b>	<b>Pilar</b>	<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Jumlah Indikator</b>
5	Penguatan Kelembagaan Pangan dan Gizi	1) Peningkatan Sumber Daya Kesehatan	Pemerataan Tenaga Kesehatan	1
		2) Perencanaan Sosial Budaya	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Kesra	2
			Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Kependudukan	1
		3) Peningkatan Ketahanan Pangan	Peningkatan Kemandirian dan Penanganan Kerentanan Pangan di Masyarakat	1
			Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	1
			Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan ketahanan pangan	1
		4) Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pengembangan sistem distribusi dan stabilitas harga pangan (gapoktan)	2
		5) Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	2
		6) Partisipasi Masyarakat	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan PKK dan Posyandu	2

## **BAB V. KERANGKA PELAKSANAAN DAN MONITORING-EVALUASI**

### **A. Kerangka Kelembagaan**

Dalam rangka mendukung terlaksananya kegiatan penyusunan perencanaan pembangunan pangan dan gizi hingga pada tahap pemantauan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang telah tertuang dalam dokumen perencanaan RAD-PG serta evaluasi, perlu dibentuk susunan kelembagaan sesuai dengan petunjuk penyusunan rencana aksi pangan dan gizi dari pemerintah dengan struktur kelembagaan sebagai berikut.

#### **1. Tim Pengarah**

Penanggung Jawab	: Bupati Pati
Ketua	: Sekretaris Daerah Kabupaten Pati
Sekretaris	: Kepala Bappeda Kabupaten Pati
Anggota	: Kepala OPD yang menangani : a. Ketahanan pangan; b. Kesehatan; c. Pendidikan; d. Pertanian; e. Sosial; f. Kelautan dan Perikanan; g. Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; h. Komunikasi dan Informatika; i. Kepegawaian/Personalia; j. Statistik; k. Agama.

#### **2. Tim Teknis (Penyusun)**

Terdiri dari kelompok-kelompok kerja (Pokja) sesuai dengan Pilar yang ada dalam RAD-PG yaitu :

- a. Pokja I : Perbaikan Gizi Masyarakat  
Ketua/Koordinator : Dinas Kesehatan  
Anggota : Bappeda, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
  
- b. Pokja II : Peningkatan Aksesibilitas Pangan Beragam  
Ketua/Koordinator : Dinas Ketahanan Pangan  
Anggota : Bagian Perekonomian Setda, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertanian

- c. Pokja III : Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan  
Ketua/Koordinator : Dinas Kesehatan  
Anggota : Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Pertanian,  
Dinas Ketahanan Pangan, Bappeda
- d. Pokja IV : Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)  
Ketua/Koordinator : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Anggota : Bappeda, Perencana Bappeda, DPUTR, Dinas Komunikasi  
dan Informatika
- e. Pokja V : Penguatan Kelembagaan Pangan dan Gizi  
Ketua/Koordinator : Perencana Bappeda  
Anggota : Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, Bappeda

### **3. Tugas dan Tanggung Jawab**

#### **a. Tim Pengarah**

- 1) Memberikan arahan pada Tim Teknis Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan - Gizi Kabupaten Pati Tahun 2017 – 2022 antara lain kebijakan yang perlu dimasukkan serta kegiatan prioritas yang diperlukan;
- 2) Mengkoordinasikan Organisasi Perangkat Daerah yang terkait untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan - Gizi Kabupaten Pati Tahun 2017 - 2022;
- 3) Melakukan pemantauan pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan - Gizi Kabupaten Pati Tahun 2017 - 2022;
- 4) Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Pati.

#### **b. Tim Teknis/Penyusun**

##### **Pokja I/Pilar I :**

- 1) Melakukan penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan - Gizi Kabupaten Pati Tahun 2017 – 2022 mulai dari membuat jadwal dan rencana kerja, mencari dan mengumpulkan bahan/data/referensi yang diperlukan, melakukan penyusunan sampai menghasilkan draf terkait perbaikan gizi masyarakat;
- 2) Menyampaikan rancangan dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan - Gizi Kabupaten Pati Tahun 2017 – 2022 terkait bidang Gizi Masyarakat;
- 3) Melakukan paparan hasil rancangan awal dan akhir dokumen RAD-PG;
- 4) Mengkoordinasikan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi;

5) Menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi.

**Pokja II/Pilar II :**

- 1) Melakukan penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan - Gizi Kabupaten Pati Tahun 2017 – 2022 mulai dari membuat jadwal dan rencana kerja, mencari dan mengumpulkan bahan/data/referensi yang diperlukan, melakukan penyusunan sampai menghasilkan draf terkait peningkatan aksesibilitas pangan beragam;
- 2) Menyampaikan rancangan dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan - Gizi Kabupaten Pati Tahun 2017 - 2022 terkait bidang aksesibilitas pangan beragam;
- 3) Melakukan paparan hasil rancangan awal dan akhir dokumen RAD-PG;
- 4) Mengkoordinasikan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi;
- 5) Menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi.

**Pokja III/Pilar III :**

- 1) Melakukan penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan - Gizi Kabupaten Pati Tahun 2017 – 2022 mulai dari membuat jadwal dan rencana kerja, mencari dan mengumpulkan bahan/data/referensi yang diperlukan, melakukan penyusunan sampai menghasilkan draf terkait peningkatan pengawasan mutu dan keamanan pangan;
- 2) Menyampaikan rancangan dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan - Gizi Kabupaten Pati Tahun 2017 – 2022 terkait bidang pengawasan mutu dan keamanan pangan;
- 3) Melakukan paparan hasil rancangan awal dan akhir dokumen RAD-PG;
- 4) Mengkoordinasikan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi;
- 5) Menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi.

**Pokja IV/Pilar IV :**

- 1) Melakukan penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan - Gizi Kabupaten Pati Tahun 2017 – 2022 mulai dari membuat jadwal dan rencana kerja, mencari dan mengumpulkan bahan/data/referensi yang diperlukan, melakukan penyusunan sampai menghasilkan draf terkait peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat;

- 2) Menyampaikan rancangan dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan - Gizi Kabupaten Pati Tahun 2017 – 2022 terkait bidang perilaku hidup bersih dan sehat;
- 3) Melakukan paparan hasil rancangan awal dan akhir dokumen RAD-PG;
- 4) Mengkoordinasikan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi;
- 5) Menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi.

**Pokja V/Pilar V :**

- 1) Melakukan penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan - Gizi Kabupaten Pati Tahun 2017 – 2022 mulai dari membuat jadwal dan rencana kerja, mencari dan mengumpulkan bahan/data/referensi yang diperlukan, melakukan penyusunan sampai menghasilkan draf terkait penguatan kelembagaan pangan dan gizi;
- 2) Menyampaikan rancangan dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan - Gizi Kabupaten Pati Tahun 2017 – 2022 terkait bidang kelembagaan pangan dan gizi;
- 3) Melakukan paparan hasil rancangan awal dan akhir dokumen RAD-PG;
- 4) Mengkoordinasikan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi;
- 5) Menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi.

**B. Pengembangan Kapasitas**

Pengembangan kapasitas kelembagaan diperlukan untuk mengawal pelaksanaan program/kegiatan RAD-PG sehingga dapat bekerja secara efektif dan efisien. Pengembangan kapasitas dimaksud dilakukan melalui :

**1. Pelatihan**

Merupakan upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia sehingga program yang direncanakan dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Pelatihan yang diberikan harus menunjang kompetensi SDM untuk melaksanakan perbaikan pangan dan gizi terutama pada 1000 HPK. Pelatihan dapat dilakukan melalui dua bentuk, yaitu *Pre service training* (meliputi pengembangan kurikulum yang sesuai dengan isu strategis gizi bagi perguruan tinggi atau pusat pelatihan tenaga kesehatan) dan *on the job/service training* (pelatihan kepada tenaga yang terkair 1000 HPK sesuai dengan kurikulum dan modul yang telah disusun).

## **2. Pedoman Teknis**

Informasi mengenai pedoman yang digunakan agar sesuai dengan standar sangat penting untuk dijadikan panduan dalam pelaksanaan program dan dapat dijadikan sebagai pedoman teknis oleh masing-masing SKPD dalam melaksanakan program.

## **3. Advokasi dan Komunikasi**

Advokasi merupakan strategi untuk mempengaruhi para pengambil keputusan khususnya saat mereka menetapkan peraturan, mengatur sumber daya dan mengambil keputusan-keputusan yang menyangkut khalayak masyarakat . Agar mencapai target yang telah ditetapkan, diperlukan pemenuhan kondisi dan asumsi, sehingga target yang ditetapkan dapat tercapai. Untuk memenuhi asumsi tersebut diperlukan adanya advokasi kepada stakeholder terkait dalam mencapai komitmen pengambil kebijakan, dan stakeholder yang terlibat sehingga diperoleh pendanaan, sumber daya manusia yang cukup, metode intervensi yang tepat, dan peningkatan cakupan serta keberlanjutan intervensi yang dilakukan, koordinasi antar pemerintah pusat dan daerah serta koordinasi lintas sektor berjalan dengan baik.

## **C. Monitoring dan Evaluasi**

### **1. Monitoring**

Aspek-aspek dalam pelaksanaan monitoring mencakup beberapa hal sebagai berikut :

- a. Aspek input yang meliputi sumberdaya yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan dan peran setiap SKPD pelaksana yang terlibat, serta sumber dana yang digunakan.
- b. Aspek Proses yang meliputi tahapan kegiatan atau program yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur (pedoman) yang ditentukan.
- c. Output yang meliputi capaian hasil kegiatan setelah kegiatan dilakukan tiap tahun.
- d. Dampak yang meliputi perubahan jangka panjang yang dicapai dari program dan kegiatan yang dilaksanakan.

### **2. Evaluasi**

- a. Dalam pelaksanaan evaluasi perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- b. Matrik evaluasi terkait perkembangan indikator pelaksanaan kegiatan yang digunakan untuk mengukur perkembangan proses dan sistem yang direncanakan.
- c. Analisis pengumpulan data dan informasi secara periodik serta lebih ditekankan kepada kendala-kendala yang terjadi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut.
- d. Mengidentifikasi penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan serta memberikan saran untuk perbaikannya.
- e. Mengidentifikasi dan menganalisis kesenjangan antara rencana dan pelaksanaan.
- f. Melihat usaha-usaha yang telah dan akan dilaksanakan dalam rangka menjaga keberlangsungan hasil kegiatan tersebut.
- g. Wawancara dengan responden kunci seperti pejabat, penanggungjawab program dan kegiatan, mengevaluasi dokumen tertulis, meninjau lapangan dan bentuk lainnya jika diperlukan.

### **3. Waktu Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi**

Waktu pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) dilaksanakan dua kali dalam satu tahun sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan dan lama waktu pelaksanaan disesuaikan dengan kondisi pada masing-masing OPD. Adapun mekanisme jalannya monitoring dan evaluasi adalah :

- a. Menyiapkan kerangka acuan serta instrumen monitoring dan evaluasi.
- b. Menentukan waktu monitoring, tim dan lokasi.
- c. Melakukan monitoring dengan melihat dampak dari pelaksanaan dan kesesuaian arah pengembangan pelaksanaan RAD-PG.
- d. Menyiapkan laporan hasil monitoring dan umpan balik tindak lanjutnya.
- e. Evaluasi dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah tetapi dapat juga dengan menggunakan *ekternal* evaluasi.
- f. Menentukan waktu evaluasi, tim evaluasi, dan lokasi evaluasi. Menyiapkan laporan hasil evaluasi.

### **4. Pelaporan Hasil Evaluasi**

Kegiatan evaluasi yang dilakukan dua kali dalam satu tahun (sesuai pelaksanaan monitoring) ditujukan untuk mengetahui seberapa jauh efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan di lapangan serta

kendala-kendala apa saja yang dihadapi baik teknis maupun non teknis terkait implementasi program dan kegiatan dimaksud.

Hasil evaluasi dilaporkan kepada Bupati selaku penanggung jawab kegiatan serta untuk memenuhi pelaporan ke Provinsi Jawa Tengah.

## **BAB VI. PENUTUP**

Dokumen RAD-PG Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 disusun guna menjalankan amanat Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan serta dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam upaya mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas melalui peningkatan kualitas dan kuantitas pangan dan gizi secara menyeluruh.

Dokumen ini disusun untuk menjadi acuan dalam menjalankan program/kegiatan terkait pembangunan pangan dan gizi di daerah sehingga arah kebijakan dalam peningkatan ketahanan pangan dan status gizi masyarakat dapat berjalan sesuai dengan koridor yang telah disepakati dan ditetapkan secara bersama.

Dalam penyusunannya, dokumen RAD-PG Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 telah mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan di atasnya untuk menjaga sinergitas dan keterpaduan antar dokumen perencanaan serta koordinasi secara intensif antar OPD untuk mewujudkan hasil perencanaan di bidang pangan dan gizi yang bersifat komprehensif dan terarah.

BUPATI PATI,

Ttd.

HARYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH, MM

Pembina

NIP. 19720424 199703 2 010